



Vol 4 No 1, Juni 2024

Rifda Fadhiilah¹

rifdafadhilah@gmail.com

Tri Widiastuty²

tri.widiastuty@ekuitas.ac.id

*^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi(STIE) Ekuitas
Bandung, Indonesia*

Kata Kunci: Tingkat
Kemandirian Keuangan
Daerah, Dana Alokasi Umum,
dan Pertumbuhan Ekonomi.

Keywords : *Level of Regional
Financial Independence, General
Allocation Funds, and Economic
Growth*

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (Studi Kasus Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2017- 2020)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2019 yang berjumlah 9 kota. Sampel dalam penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling sehingga jumlah kabupaten/kota yang terpilih menjadi 9 kota. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel independen yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi. Variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

The objective of this study is to determine how the General Allocation Fund and Economic Growth affect the West Java Province's level of regional financial independence between 2017 and 2020. The nine cities in the West Java Province from 2017 to 2019 made up the study's population. Purposive sampling was used to gather the samples for the study, resulting in the selection of nine districts/cities. Secondary data is the kind of data that is used.

Economic growth and general allocation funds are the independent variables that are considered. The degree of financial independence in a region is the dependent variable that is being employed. Panel data regression and descriptive statistics are the methods of data analysis that are employed. The study's findings indicate that: (1) Economic Growth has a partial impact on the level of regional financial independence; (2) General Allocation Funds has a partial impact on the level of regional financial independence; and (3) Both Economic Growth and General Allocation Funds have no concurrent effect on the level of regional financial independence.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai pelimpahan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dimilikinya dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya. Kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran penting yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Rasio kemandirian dapat digunakan untuk mengukur kemandirian suatu daerah yang dihitung dengan membagi pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan daerah (PD) yang berasal dari sumber lain (Abdul Halim, 2008). Semakin tinggi angka rasio, maka semakin mandiri pemerintah daerah terhadap perekonomian daerahnya. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah di 9 Kota Provinsi Jawa Barat 2017-2020 tergolong menurun disetiap tahunnya dimana komponen pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan yang dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini bertentangan dengan teori Halim (2012) yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

Selain itu, dana alokasi umum (DAU) juga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut (Rizani et al, 2011) dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan

memeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi sebagai bentuk transfer dari pemerintah pusat yang bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) pusat kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum (DAU).

Realitanya pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditujukan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum (DAU) dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendanai belanja daerah Rata-rata realisasi dana alokasi umum (DAU) Kota d Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2020 tidak merata. Hal initerletak dalam perbedaan pemahaman fungsi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan dana transfer untuk pemerataan keuangan daerah, sedangkan pemerintah daerah merespon dana transfer sebagai pemberian dana untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sehingga tidak menjadi lebih mandiri namun semakin bergantung pada pemerintah pusat.

Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, digunakanlah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu Data produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat berfluktuatif dan cenderung menurun. Dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan karena terdampak oleh pandemi Covid-19 dimana menunjukkan pertumbuhan yang negatif yaitu -2,44%. Berkurangnya aktivitas masyarakat secara drastis sangat signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, kondisi ini sangat terasa khususnya di Provinsi Jawa Barat yang termasuk ke dalam salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Menurut penelitian Widiastutis (2021), pada masa pandemi covid-19 sebagian besar kota di Pulau Jawa memberlakukan kebijakan PSBB baik

skala mikro maupun zona kawasan tertentu. Sehingga provinsi-provinsi di Pulau Jawa inilah yang dominan memegang peranan dalam mendukung angka laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terkhusus Provinsi Jawa Barat.

2. Identifikasi Masalah/Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.
2. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.
3. Bagaimana Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017- 2020.
5. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.
6. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.

6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) (*expenditure discretion*). (Halim:2014)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah atau untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi di suatu daerah. DAU ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) di suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi suatu daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Dan sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar, maka juga akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip diatas menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Schumpeter (2013:411) pertumbuhan ekonomi adalah “pertambahan output yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.”

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka waktu tertentu yang kemudian menaikkan kapasitas suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional atau daerah sebagai alat ukur. Tujuan dari PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Halim (2013:5) tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu “Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiscal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Tilawatil dan Rina (2019), ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Afarahim, 2013) memperkenalkan empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan otonomi daerah (tingkat kemandiriannya sangat kurang).
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena kemampuan pemerintah mulai meningkat dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian berarti daerah memiliki hak dan kewajiban untuk bersikap bebas dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung dan campur tangan dari pemerintah pusat. Daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu menggali, mengelola dan membiayai kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan sumber-sumber keuangannya sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif karena dalam penelitian ini banyak menggunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif ini mempunyai kelebihan dimana dalam penelitian ini menggunakan sampel untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu penelitian kuantitatif dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat terhadap variable yang akan diteliti. metode kuantitatif menurut Sugiyono (2018:8) yaitu metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini diperlukan data-data yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data diperoleh dari internet serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

a. Statistik Deskriptif

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari portal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat dan portal Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Jumlah data yang digunakan sebanyak 9 Kota untuk periode 4 tahun sehingga terdapat total 36 data yang diolah.

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan uji hipotesis. karena data yang digunakan adalah data panel maka penulis melakukan uji asumsi klasik untuk normalitas dan multikolinieritas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Hasil uji normalitas menunjukkan $2,817831 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai $0,39 < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi.

c. Hasil Regresi Data Panel**1) Common Effect Model**

Berdasarkan hasil regresi dengan Common Effect Model (CEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai Konstanta sebesar 2,862625 dengan probabilitas sebesar 0,0072. Persamaan regresi pada nilai Adjusted R² sangat rendah sebesar -0,054039 menjelaskan bahwa variasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tidak dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi.

2) Fixed Effect Model

Berdasarkan hasil regresi dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai Konstanta sebesar 0,469518 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Persamaan regresi pada nilai Adjusted R² sangat tinggi sebesar 0,958255 menjelaskan bahwa variasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi dan sisanya sebesar 4% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, asumsi dengan memakai model Fixed Effect Model (FEM) lebih realistis dalam menentukan pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

3) Random Effect Model

Berdasarkan hasil regresi dengan Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa terdapat nilai Konstanta sebesar 0,469045 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Persamaan regresi pada nilai Adjusted R² sangat rendah yaitu sebesar

0,101158 menjelaskan bahwa variasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi hanya sebesar 10% sisanya 90% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, asumsi dengan memakai model Random Effect Model (REM) tidak realistis dalam menentukan Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

d. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

1) Uji Chow

Hasil dari uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section F sebesar 0,0000

$< 0,05$, artinya H_0 ditolak. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2) Uji Hausman

Hasil dari uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section random sebesar $0,6243 > 0,05$ artinya H_0 diterima. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Random Effect Model* (REM).

3) Uji Lagrange Multiplier

Hasil dari uji lagrange multiplier menunjukkan bahwa nilai Breusch-Pagan sebesar $0,0000 < 0,05$ artinya H_0 ditolak. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Random Effect Model* (REM).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan model terbaik yang digunakan untuk menentukan Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2020 adalah Random Effect Method (REM).

e. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Hasil yang diperoleh dari uji koefisien determinasi dengan nilai adjusted R^2 sebesar 0,101158, artinya 10% variasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan 90% Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

2) Uji F (Uji Simultan)

Hasil yang diperoleh dari uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 2,969490 dan nilai probabilitas sebesar 0,065183 lebih besar dari signifikan 0,05 ($0,065183 > 0,05$). Hal ini memiliki arti bahwa pada Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama (simultan) tidak mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

PEMBAHASAN

1) Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tidak sejalan dengan teori. Hal ini terjadi karena sebagian besar pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Umum untuk belanja pegawai. Dana Alokasi Umum digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutup celah fiskal yaitu selisih antara kapasitas fiskal yang tersedia dengan kebutuhan dasar yang salah satunya adalah belanja pegawai. Belanja pegawai adalah belanja pemerintah yang dibayarkan ke pegawai sebagai kompensasi atas kinerja yang dilakukan pegawai sehingga tidak menghasilkan asset jangka panjang dan investasi bagi pemerintah daerah yang diharapkan mampu memberi manfaat yang multi periode dan mampu mendongkrak perekonomian dengan lebih cepat.

2) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Secara parsial pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Ini ditunjukkan dengan hasil dari uji t (parsial) yang menunjukkan angka sebesar 0,0556. Ini menunjukkan bahwa peningkatan maupun nilai perekonomian kota di Jawa Barat selama tahun 2017-2020 mampu mengurangitingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam kehidupan perekonomian kota di Jawa Barat selama 2017-2020 memberi pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dalam pemerintah kota di Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi biasanya dibarengi dengan infrastruktur dan sarana prasarana.

Jika sarana dan prasarana suatu daerah baik maka akan membuat aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi nyaman dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas.

3) Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dimana hal ini dapat diketahui dari hasil uji F (simultan) nilai signifikannya yang menunjukkan angka sebesar 0,065183 lebih besar dari 0,05 ($0,065183 > 0,05$). Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai sebesar 0,101158 yang berarti Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah hanya sebesar 10%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas untuk membuktikan hipotesis dari permasalahan yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2020, berikut kesimpulan yang bisa ditarik :

1. Variabel Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2020.
2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2020.
3. Variabel Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Ali Ibrahim Hasyim (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta. Prenadamedia Group.

- Afarahim. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010*. Jurnal Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
- Arpani, W. N & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kab/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(1).
- Badan Pusat Statistik. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat 2017-2020.
Tersedia: <https://jabar.bps.go.id> Diakses tanggal 15 November 2023.
- Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2017-2020.
Tersedia: <https://jabar.bps.go.id> Diakses tanggal 15 November 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2020. Tersedia : <https://jabar.bpk.go.id> Diakses tanggal 10 November 2023.
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*. Yogyakarta : UPP
- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). *Financial independence of regencies and cities in Central Java. Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 199.
- Gaghana, R. L., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Koata Manado, Kota Bitung, Kota Toomohon, dan Kota Kotamobagu). *Jurnal Pembanguna Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7).
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*" Edisi 4. Jakarta : Erlangga.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Marizka Reza, (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)*. *Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang*.
- Mardiasmo, (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi: Yogyakarta.

- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 110-118.
- Mukarramah Habibatul, (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nur'ainy, R., Desfitriana, D., & Utomo, R. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat). *Prosiding PESAT*, 5.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174-186.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 3(1), 298-314.
- Sulangi, P. G., Anwar, C., & Ulupui, I. G. K. A. (2022). The Effect of General Allocation Funds, Economic Growth, and Area On The Level of Financial Independence of The Provincial Government Regions In Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(2), 344- 354.
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20-36.
- Susanti, Dian B., Sri Rahayu, dan Siska P. Yudowati. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *E-Proceeding of Management Vol. 3 No. 3*. ISSN: 2355-9357.

- Sari, Yuliani Dwi Purnama. (2020). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Yang Dipengaruhi Belanja Modal dan Pajak Daerah Pemerintahan Daerah (Survey Pada Enam Kabupaten Yang Ada di Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019). Universitas Komputer Indonesia.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2015. *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.
- Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- Undang Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yoda, Tilawatil C dan Febriani, Rina. (2019). *Analysis of Regional Financial Independence Using Williamson Index Between Cities in West Sumatera*. Jurnal Ilmiah Akuntansi 3(4).